

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pada Program Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara, maka dapat disimpulkan bahwa Dinas PPO belum bisa menetapkan indikator kinerja yang memadai pada setiap program/kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan sehingga program/kegiatan di Dinas PPO belum bisa terukur dengan jelas. Dinas PPO hanya mencantumkan indikator kinerja sebatas nilai efisiensi yaitu melihat serapannya saja tetapi tidak bisa melihat strategis dan dampak dari program yang telah dibuat, dilihat dari capaian atau realisasi dari indikator keluaran (output) yang dihasilkan dalam merealisasikan kegiatan dalam setiap program terhadap indikator masukan (input) yang digunakan dan belum ke outcome. Dinas PPO kurang memahami dan menguasai penyajian indikator kinerja, terlihat dari Indikator Kinerja dalam LAKIP dinas PPO yang tidak dapat terukur dengan jelas dan dimana tujuan, sasaran dan strategi organisasi yang berupa visi dan misi Dinas PPO Kabupaten TTU lebih menekankan ke pendidikan belum ada visi yang menonjol di pemuda dan olahraga.

5.2. Keterbatasan

1. Berdasarkan studi dokumentasi Data LAKIP Dinas PPO tidak lengkap karena dalam LAKIP dinas PPO hanya mencantumkan indikator kinerja sebatas nilai efisiensi yaitu melihat serapannya saja tetapi tidak bisa melihat strategis dan dampak dari program yang telah dibuat
2. Penelitian lebih berfokus pada analisis LAKIP berdasarkan IKU. Untuk mengetahui dan mengevaluasi pengukuran kinerja bisa menggunakan Skala pengukuran kinerja juga dan menggunakan nilai efisiensi, efektifitas dan ekonomi.

5.3. Saran

1. Untuk Penelitian selanjutnya sebaiknya dilakukan di Dinas yang Data LAKIP lebih lengkap sehingga Evaluasi Indikator kinerja bisa terukur dengan jelas.
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas pengukuran kinerja yaitu tidak memengevaluasi kinerja berdasarkan IKU saja tetapi bisa menggunakan skala pengukuran kinerja, nilai efisiensi, efektifitas dan ekonomi.
3. Untuk Dinas PPO Kabupaten TTU diharapkan agar penetapan indikator kinerja pada setiap program/kegiatan perlu diperhatikan sehingga indikator kinerja dapat terukur dengan jelas dan perbaikan dalam bentuk penyajian laporan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, 2015, *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, Dinas PPO Kabupaten Timor Tengah Utara.
- Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, 2016, *Rencana Kerja*, Dinas PPO Kabupaten Timor Tengah Utara.
- Halim A., dan M.H. Kusufi, 2014, *Akuntansi Sektor Publik*, edisi kedua., Jakarta: Salemba Empat.
- Anonim., 2012, (http://www.wonosobokab.go.id/data/Transparansi_Anggaran_Daerah/Laporan/Lakip_2012/6.%20BAB%20III.pdf, diunduh 19 Mei 2016).
- Mahmudi., 2015, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mahsun, M., 2003, Memformulasikan Sistem Pengukuran Kinerja Kantor Pemadam Kebakaran, *Makalah disajikan dalam seminar akademik STIE Widya Wiwaha*, Akademik STIE Widya Wiwaha, 15 Februari 2013.
- Mardiasmo., 2002, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: ANDI.
- Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2010, *Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintahan*.
- Republik Indonesia, 1999, *Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan*.

- Santoso, Susan., 2013, Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara, *Jurnal EMBA*, Vol. 1, No. 4, Desember: 160-170.
- Suandy, E., 2011, *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Subastian, A., dan I.B. Riharjo, 2013, Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Kota Surabaya Melalui Pendekatan Value For Money, *jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 2, No. 11.
- Sugiyono, 2011, *Statistik untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Susantih, H., dan Y. Saftiana, 2009, Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Se-Sumatra Bagian Selatan, *Makalah disajikan dalam Simposium Nasional Akuntansi 12 Palembang*, Palembang, 3-9 November.
- Wakhyudi., dan L.F. Tarunasari, 2013, Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah melalui Rasio Keuangan Daerah, *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, Vol. 1, No. 2, Agustus: 139-150.